

ANALISIS FLYPAPER EFFECT PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DI KOTA JAYAPURA

Transna Putra Urip¹
transnaputra@yahoo.co.id

Rachmaeny Indahyani²
irachmaeny@yahoo.co.id

Abstract: This research generally have aims to analysys flypaper effect in Regional financial management on Jayapura City. More specific, the objectives are: (a) Flypaper Effect (b) efficiency in Regional financial managemen. Method will be used to analysis are : 1) Multiple regression, 2) analysis efficiency. The result this research are : 1) The fenomena flypaper in Regional Financial Management on Jayapura city is not founded, 2) Spend of money government at the health office especially for five groups expenditure show if the expenditure be used efficient. 3) Spend of money govermen at the education office for five groups expenditure show if the expenditure be used inefficient.

Keywords : Flypaper effect, efficiency, Regional Financial Management.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Implikasi langsung atas implementasi otonomi daerah adalah kebutuhan dana yang cukup besar sebagai modal awal menuju kemandirian pemerintah daerah. Sumber dana utama pemerintah daerah berasal dari PAD yang dipakai untuk membiayai belanja modal dan pembangunannya. Namun dalam beberapa tahun berjalan sumber pembiayaan daerah tidak hanya berasal dari PAD saja. Pemerintah daerah juga mendapatkan bantuan transfer dana dari pemerintah pusat berupa Dana Perimbangan. Berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004 Dana Perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Tujuan dari transfer ini adalah untuk mengurangi atau menghilangkan kesenjangan fiskal antar pemerintah dan menjamin tercapainya standar pelayanan publik minimum di seluruh daerah.

Daerah yang mempunyai kemampuan fiskal rendah akan mendapatkan DAU dalam jumlah yang relatif besar, sebaliknya daerah yang mempunyai kemampuan fiskal tinggi akan mendapatkan DAU dalam jumlah yang kecil. Pemberian DAU ini diharapkan dapat mengurangi disparitas fiskal horisontal, sehingga daerah mempunyai tingkat kesiapan fiskal yang relatif sama dalam mengimplementasikan otonomi daerah. Daerah diharapkan mampu mengalokasikan sumber dana ini pada sektor-sektor produktif sehingga dapat mendorong peningkatan investasi di daerah dan juga pada sektor yang berdampak pada peningkatan pelayanan publik serta dapat meningkatkan kontribusi publik terhadap PAD. Hal ini diharapkan agar kemandirian daerah menjadi semakin tinggi seiring dengan meningkatnya kapasitas fiskal daerah, yang menyebabkan tanggungan pemerintah untuk memberikan DAU bisa lebih dikurangi.

Permasalahan yang terjadi saat ini adalah pemerintah daerah terlalu menggantungkan alokasi DAU untuk membiayai belanja modal dan pembangunan tanpa mengoptimalkan potensi yang dimiliki oleh daerah. Bukti-bukti empiris secara internasional menunjukkan bahwa tingginya ketergantungan pada transfer ternyata berhubungan negatif dengan hasil governansinya. Hal ini berarti pemerintah daerah akan lebih berhati-hati dalam menggunakan dana yang digali dari masyarakat sendiri dibandingkan dengan dana transfer dari pemerintah pusat (Kuncoro, 2007:3).

Dalam UU No. 33 tahun 2004 disebutkan bahwa tujuan dana perimbangan adalah untuk mengurangi kesenjangan fiskal (fiscal gap) antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Bagi pemerintah daerah dana perimbangan merupakan salah satu pos pendapatan yang sangat signifikan, hal ini nampak pada prakteknya bahwa transfer dari pusat merupakan sumber dana utama bagi beberapa pemerintah daerah untuk membiayai keperluan operasional dan wajib dilaporkan dalam perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. (Marbun Robert dkk, 2015:3) Ketika penerimaan daerah berasal dari transfer dari pemerintah pusat, maka stimulus yang ditimbulkan berbeda dengan stimulus yang muncul dari pendapatan daerah (terutama pajak daerah). Saat respon (belanja) daerah lebih besar terhadap transfer daripada pendapatan asli daerahnya sendiri, maka disebut flypaper effect (Hines dalam Marbun R dkk, 2015:3).

Di saat transfer DAU yang diperoleh besar, maka pemerintah daerah berusaha agar pada periode berikutnya DAU yang diperoleh tetap. Hal ini menyebabkan PAD tidak signifikan berpengaruh terhadap Belanja Daerah yang menyebabkan terjadinya flypaper effect atau dapat dikatakan bahwa pengaruh DAU terhadap Belanja Daerah lebih besar daripada

pengaruh PAD terhadap Belanja Daerah. Dengan arti lain pemberian DAU yang seharusnya menjadi stimulus peningkatan kemandirian daerah, justru direpson berbeda oleh daerah. Daerah tidak menjadi lebih mandiri, malah semakin bergantung pada pemerintah pusat (Ndadari dan Adi.2008:3).

Beberapa penelitian yang dilakukan di Indonesia menunjukkan bahwa ketika penerimaan daerah berasal dari transfer, maka stimulasi atas belanja yang ditimbulkannya berbeda dengan stimulasi yang muncul dari PAD. Oates dalam Halim (2002) menyatakan ketika respon belanja daerah lebih besar terhadap transfer daripada pendapatannya sendiri, maka disebut flypaper effect. Istilah flypaper effect pertama kali dikemukakan oleh Courant, Gramlich, dan Rubinfeld (1979) dalam Kuncoro (2007), untuk mengartikulasikan pemikiran Arthur Okun (1930) yang menyatakan “money sticks where it hits”. Sejauh ini, belum ada padanan kata “flypaper effect” dalam bahasa Indonesia, sehingga kata ini dituliskan sebagaimana adanya tanpa diterjemahkan.

Secara bebas flypaper effect menurut Wordpress.com flypaper effect adalah suatu fenomena pada suatu kondisi ketika pemda merespon belanja daerahnya lebih banyak berasal dari transfer atau spesifiknya pada transfer tidak bersyarat (unconditional grants) daripada PAD-nya tersebut sehingga akan mengakibatkan “pemborosan” dalam belanja daerah. Ditemukannya fenomena flypaper effect mengidentifikasi bahwa pemda dalam memenuhi kebutuhan publik senantiasa cenderung lebih merespon atas pengeluaran belanja daerahnya dari transfer, “berhemat” dalam optimalisasi pengeluaran yang berasal dari PAD-nya yang merupakan hasil dari kenaikan pendapatan domestik bruto, sehingga akan menciptakan kecenderungan pemborosan belanja daerah. Flypaper effect juga mempengaruhi kecenderungan belanja pemda pada periode selanjutnya, sehingga efek tersebut akan berakibat jangka panjang. (Imam Santoso, dkk 2015)

Dengan latar belakang tersebut maka akan dibahas kecenderungan respon pemerintah daerah Kota Jayapura dalam mengelola pengeluarannya, melalui suatu penelitian yang berjudul “Analisis Flypaper Effect dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Di Kota Jayapura”.

B. Perumusan Masalah

1. Apakah terjadi Flypaper Effect dalam pengelolaan keuangan di Pemerintah Daerah Kota Jayapura ?
2. Apakah terjadi inefisiensi dalam pengelolaan Keuangan di Pemerintah Daerah Kota Jayapura ?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuannya secara umum adalah untuk memberikan gambaran yang jelas tentang terjadinya Flypaper effect dan inefisiensi dalam pengelolaan keuangan di pemerintah kota Jayapura dan diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pemerintah Kota Jayapura dalam penentuan kebijakan dan perencanaan pembangunan di kota Jayapura.
2. Tujuan Secara khusus, tujuan yang ingin dicapai dari studi ini adalah:
 - a. Untuk menganalisis dan membuktikan terjadinya Flypaper Effect dalam pengelolaan keuangan di Pemerintah Daerah Kota Jayapura.
 - b. Untuk menganalisis dan membuktikan terjadinya inefisiensi dalam pengelolaan Keuangan di Pemerintah Daerah Kota Jayapura.

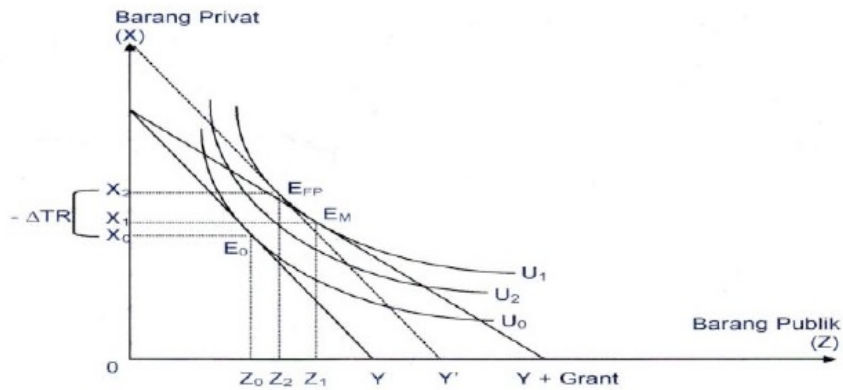
TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Teori Flypaper Effect

Perilaku pemerintah daerah dalam hubungannya dengan transfer pemerintah pusat yang merupakan salah satu sumber pendapatan daerah, selanjutnya akan dialokasikan pada berbagai kegiatan pembangunan di daerah dalam bentuk belanja daerah, tentunya sangat ditentukan oleh bagaimana pemerintah daerah memandang transfer dana tersebut. Menurut Gamkar dan Oates dalam Abdullah dan Halim (2003) Pemerintah daerah bisa merespon transfer dari pusat secara simetris dan tidak simetris. Dalam kaitannya dengan alokasi dana yang diperoleh baik berupa dana transfer dari pemerintah yang lebih tinggi maupun yang berasal dari pendapatan asli daerahnya merupakan objek yang telah diteliti dan dijelaskan oleh berbagai pihak. Menurut Alderete (2004) ketika pemerintah pusat memberikan bantuan melalui transfer kepada pemerintah daerah untuk meningkatkan belanja daerah, terdapat spekulasi bahwa pengeluaran pemerintah daerah merespon perubahan transfer tersebut secara asimetris. Hal ini tentunya menjadi bentuk perilaku pemerintah daerah yang cenderung akan mendorong ke arah penggunaan anggaran yang tidak efisien. Salah satu fenomena perilaku pemerintah

dalam hubungannya dengan transfer dikemukakan oleh Wilde (1968) dalam Kuncoro (2007) yang memelopori analisis transfer ke dalam format kendala anggaran dan kurva indiferensi.

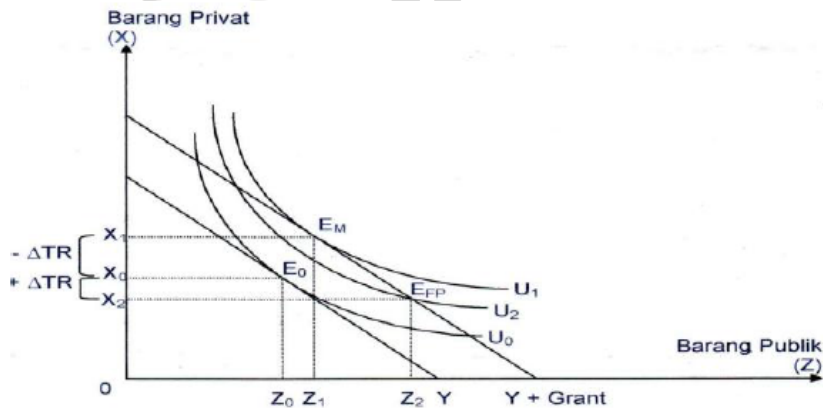


Sumber : Haryo Kuncoro, Simposium Nasional Akuntansi X Makassar. 2007

Gambar 1. Pengeluaran konsumsi barang privat dan barang publik.

Masyarakat sebagai kumpulan individu juga memiliki preferensi seperti halnya seorang individu, sebagaimana ditunjukkan oleh kurva indiferensi (U_0, U_1, U_2) dengan kendala anggaran (garis Y dan $Y+G$ (grants)). Sebagaimana individu, masyarakat juga dianggap berperilaku rasional dimana dalam berkonsumsi akan memaksimalkan utilitas sesuai dengan kendala pendapatannya.

Teori Pemajakan dalam kasus bantuan tak bersyarat (unconditional grants), sebagaimana ditunjukkan dalam gambar 2.2. Transfer sebesar G mendorong kenaikan garis anggaran dari Y ke $Y+G$. Barang publik diasumsikan sebagai barang normal. Dengan asumsi tersebut maka transfer yang bersifat umum (lump-sum) akan menggeser keseimbangan konsumen dari titik E_0 ke E_M . Pada posisi keseimbangan yang baru tersebut, konsumsi barang publik dan barang privat masing-masing menjadi sebesar Z_1 dan X_1 .



Sumber : Haryo Kuncoro, Simposium Nasional Akuntansi X Makassar. 2007

Gambar 2. Konsumsi Barang Publik dan Penerimaan Pajak Lokal.

Dengan sifatnya yang tidak bersyarat, maka tekanan fiskal pada basis pajak lokal akan menurun yang kemudian mengakibatkan penerimaan pajak juga mengalami penurunan, yaitu sebesar $-\Delta TR$, sementara pengeluaran konsumsi barang publik tetap meningkat. Ini berarti transfer akan mengurangi beban pajak masyarakat, sehingga pemerintah daerah tidak perlu menaikkan pajak guna membiayai penyediaan barang publik.

Dengan demikian, analisis ini menegaskan bahwa pengeluaran pemerintah daerah dalam penyediaan barang publik tidak akan berbeda sebagai akibat dari penurunan pajak daerah atau kenaikan transfer.

Fenomena flypaper effect membawa implikasi lebih luas bahwa transfer akan meningkatkan belanja pemerintah daerah yang lebih besar daripada penerimaan transfer itu sendiri (Turnbull, 1998). Fenomena flypaper effect dapat terjadi dalam dua versi (Gorodnichenko, 2001). Pertama, merujuk pada peningkatan pajak daerah dan anggaran pemerintah yang berlebihan. Kedua, mengarah pada elastisitas pengeluaran terhadap transfer yang lebih tinggi daripada elastisitas pengeluaran terhadap penerimaan pajak daerah. Dalam ilmu ekonomi, untuk mengukur kepekaan (sensitive) permintaan terhadap perubahan-perubahan harga dan terhadap perubahan-perubahan pendapatan digunakan konsepsi elastisitas, yaitu suatu ukuran perbandingan dalam mana perubahan-perubahan baik dalam pembilang maupun penyebut dinyatakan dalam bentuk perbandingan atau persentase (Hirshleifer, 1985).

2. Model Ilusi Fiskal

Model Ilusi Fiskal (fiscal illusion model) pertama kali dikemukakan oleh ekonom Italia bernama Amilcare Puviani yang menggambarkan ilusi fiskal terjadi saat pembuat keputusan yang memiliki kewenangan dalam suatu institusi menciptakan ilusi dalam penyusunan keuangan (rekayasa) sehingga mampu mengarahkan pihak lain pada penilaian maupun tindakan tertentu. Maksud dari penjelasan di atas dalam konteks penelitian ini adalah pemerintah daerah melakukan rekayasa terhadap anggaran agar mampu mendorong masyarakat untuk memberikan kontribusi lebih besar dalam hal membayar pajak atau retribusi, dan juga mendorong pemerintah pusat untuk mengalokasikan dana dalam jumlah yang lebih besar. Apabila terdapat respon yang asimetris terkait dengan penerimaan maupun pengeluaran maka dapat diindikasikan terjadi ilusi fiskal. (Shinta, 2009: 38)

3. Anggaran Berbasis Kinerja

Anggaran Berbasis Kinerja merupakan metode penganggaran bagi manajemen untuk mengaitkan setiap biaya yang dituangkan dalam kegiatan-kegiatan dengan manfaat yang dihasilkan. Dilain sisi, dapat juga dikatakan bahwa anggaran dengan pendekatan kinerja merupakan suatu sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja atau output dari perencanaan alokasi biaya atau input yang ditetapkan (Siska, 2009). Anggaran yang disusun dengan pendekatan kinerja mengutamakan pada pencapaian hasil (outcome/output) dengan tidak menyampingkan prinsip-prinsip anggaran yakni transparansi dan akuntabilitas anggaran, disiplin anggaran, keadilan anggaran, efisiensi dan efektifitas anggaran. Penggunaan Analisa Standar Belanja (ASB) oleh pemerintah daerah akan meminimalkan penyerapan APBD dan mendorong penetapan biaya dan pengalokasian anggaran kepada setiap unit kerja menjadi lebih logis dan pencapaian efisiensi secara terus-menerus karena adanya perbandingan biaya per unit output juga diperoleh praktik-praktik terbaik dalam desain aktivitas.

4. Analisis Standar Belanja

Analisis Standar Belanja adalah Standar yang digunakan untuk menganalisis kewajaran beban kerja atau biaya setiap program atau kegiatan yang akan dilaksanakan oleh suatu Satuan Kerja dalam satu tahun anggaran dasar hukum manfaat menggunakan Analisis Standar Belanja adalah :

- a. Penetapan plafon anggaran pada saat Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) menjadi obyektif, tidak lagi berdasarkan "intuisi"
- b. Dapat menentukan kewajaran biaya untuk melaksanakan suatu kegiatan.
- c. Meminimalisir terjadinya pengeluaran yang kurang jelas yang menyebabkan inefisiensi anggaran.
- d. Penentuan anggaran berdasarkan pada tolok ukur kinerja yang jelas.
- e. Penentuan besaran alokasi setiap kegiatan menjadi obyektif.
- f. Memiliki argumen yang kuat jika "dituduh" melakukan pemborosan.
- g. Penyusunan anggaran menjadi lebih tepat waktu.

5. Efisiensi : Makna dan Konsep

Menurut Mardiasmo (2009) Efisiensi merupakan pencapaian output yang maksimum dengan input tertentu atau penggunaan input yang terendah untuk mencapai output tertentu. efisiensi merupakan perbandingan antara output /input yang dikaitkan dengan standarkinerja atau target yang telah ditetapkan. pengertian efisiensi berhubungan dengan konsep produktivitas. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara output yang dihasilkan

terhadap input yang digunakan (cost of output). Proses kegiatan operasional dapat dikatakan efisien apabila suatu produk atau hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya dan dana yang serendah-rendahnya (spending well). Efisiensi yang diukur dengan membandingkan input dan output, maka perbaikan efisiensi dapat dilakukan dengan cara :

- a. Meningkatkan output pada tingkat input yang sama
- b. Meningkatkan output dalam proporsi yang lebih besar daripada proporsi peningkatan input
- c. Menurunkan input pada tingkatan output yang sama
- d. Menurunkan input dalam proporsi yang lebih besar daripada proporsi penurunan output.

Dalam pengukuran kinerja value for money, efisiensi terdiri dari efisiensi alokasi dan efisiensi teknis atau manajerial. Efisiensi alokasi terkait dengan kemampuan untuk mendayagunakan sumberdaya input pada tingkat kapasitas optimal. Efisiensi teknis terkait dengan kemampuan mendayagunakan sumber daya input pada tingkat output tertentu. Hal ini juga dikemukakan oleh Ramesh Bhat (2001) dalam Wulansari (2010). Pengukuran Kinerja dan Efisiensi Sektor Publik sebagaimana dikemukakan Mardiasmo (2009) juga menyatakan bahwa pengukuran kinerja sektor publik dilakukan untuk memenuhi tiga tujuan yaitu:

- a. Untuk membantu memperbaiki kinerja pemerintah.
- b. Untuk mewujudkan pertanggungjawaban publik.
- c. Untuk memperbaiki komunikasi kelembagaan.

Dalam kaitannya dengan pengeluaran belanja pemerintah daerah, ada tiga jenis efisiensi yang penting untuk dilihat yaitu (Kurnia, 2006):

- a. Efisiensi produksi , menyangkut biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan output tertentu.
- b. Efisiensi alokasi adalah efisiensi yang menyangkut kesesuaian pengeluaran belanja dengan preferensi masyarakat.
- c. Efisiensi fiskal adalah efisiensi yang menyangkut sumber penerimaan pemerintah daerah untuk membiayai pengeluaran belanja pemerintah daerah.

METODELOGI PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Jayapura, dimana secara khusus data diambil dari Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah (BPKAD) dan Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) Kota Jayapura.

B. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, guna mendukung analisis yang akan dilakukan adalah data Kuantitatif yang dalam hal ini berupa nilai Dana Perimbangan (DP), Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Belanja Daerah (BD) serta Buku ASB

b. Sumber data

Sumber data dalam penulisan ini adalah sumber sekunder, yaitu data yang diperoleh dari hasil publikasi pihak terkait yang dalam hal ini adalah hasil publikasi BPKAD dan Dispenda Kota Jayapura.

C. Teknik Pengumpulan data

Teknik Pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan cara dokumentasi, jenis-jenis dokumen yang digunakan pada penelitian ini meliputi dokumen-dokumen yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah dalam hal ini Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (BPKAD) dan Dispenda Kota Jayapura.

D. Teknik Analisis data

- a. Alat analisis regresi berganda., digunakan untuk membuktikan secara empiris mengenai ada tidaknya fenomena flypaper effect dalam pengelolaan keuangan daerah di Kota Jayapura. Adapun persamaan-persamaan yang digunakan dalam pengujian, adalah: $Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$

Dan kemudian dijabarkan sebagai berikut:

Untuk menilai flypaper effect $Y_i = \alpha + \beta_1 DP1_i + \beta_2 PAD2_i + e$

Menggunakan lag 1 tahun $Y_i = \alpha + \beta_1 DP1_{t-1} + \beta_2 PAD2_{t-1} + e$

Dimana :

- Y : Jumlah Belanja Daerah (BD)
- A : Konstanta
- β_1, β_2 : Koefisien regresi
- DP_{1i} : Kumlah DP tahun berjalan
- PAD_{2i} : Jumlah PAD tahun berjalan
- PAD_{1t-1} : PAD tahun sebelumnya
- BD_{1t-1} : Jumlah DP tahun sebelumnya, dan
- e : Error term.

Untuk menentukan apakah terjadi flypaper effect, maka efek DP terhadap BD dibandingkan dengan efek PAD terhadap BD. Dalam regresi berganda, dibandingkan koefisien regresi untuk masing-masing variabel dimana syarat terjadinya flypaper effect adalah:

- a) Apabila efek (nilai koefisien) DP terhadap Belanja Daerah lebih besar daripada efek PAD dan keduanya sama-sama signifikan, atau
 - b) PAD tidak signifikan, maka dapat disimpulkan terjadi flypaper effect. atau
 - c) jika koefisien DP > Koefisien PAD maka terjadi flypaper Effect, atau dapat difungsikan jika $b_1 > b_2$ berarti $b_1/b_2 > 1$ maka terjadi flypaper Effect (Tresch, 2002:924).
- b. Rasio Efisiensi, digunakan untuk mengukur efisiensi biaya :

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Input}}{\text{Output}}$$

Dimana: *Input* adalah total belanja berdasarkan ASB
Output adalah total anggaran berdasarkan DPA

Sehingga dapat disimpulkan :

- Jika : $E < 1$ tidak efisien
- $E \geq 1$ efisien

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Flypaper Effect dalam pengelolaan keuangan di Pemerintah Daerah Kota Jayapura

Hasil analisis regresi berganda antara variabel dana perimbangan dan pendapatan asli daerah terhadap belanja daerah menunjukkan temuan sebagai berikut :

Tabel 1. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda Pengaruh Dana Perimbangan (DP) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah

Koefisien	Nilai Koefisien	Signifikansi ($\alpha = 0,05$)		Keterangan
		p.value	T/F	
Korelasi (R)	0,978	0,000	76,755	Signifikan
Determinasi (R ²)	0,956	0,000	76,755	Signifikan
Konstanta (a)	323.980.494.550,513	0,242	1,279	Tidak Signifikan
DP (β_1)	0,113	0,888	0,146	Tidak Signifikan
PAD (β_2)	5,784	0,064	2,196	Signifikan

Sumber : data diolah 2017

Catatan : $\alpha = 0,10$ Signifikansi uji t dengan t-tabel, $t_{0,10,9} = 1,833$

Hasil analisis data pada tabel 5.1 memberikan nilai koefisien korelasi (R) sebesar 0,978. Nilai ini menunjukkan bahwa hubungan antara variabel dana perimbangan dan pendapatan asli daerah dengan belanja daerah sebesar 97,8% dan hubungannya masuk dalam kategori sangat kuat. Untuk mengetahui nilai hubungan ini signifikan maka dilakukan uji koefisien korelasi ganda, dimana uji pengaruh secara bersama-sama dilakukan dengan menggunakan uji F melalui perbandingan antara tingkat signifikansi dengan P. Value. Hubungan dinyatakan memiliki tingkat yang signifikan, apabila nilai P.value lebih kecil dari nilai tingkat signifikansi (α) yang ditetapkan (0,10). Karena nilai P. Value (0,000) < α (0,10)

maka dapat disimpulkan bahwa secara bersama-sama terdapat hubungan yang kuat dan signifikan antara variabel dana perimbangan dan pendapatan asli daerah dengan variabel belanja daerah.

Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda dimana diperoleh konstanta maupun koefisien regresi berganda maka model persamaan regresi antara dana perimbangan dan pendapatan asli daerah terhadap belanja daerah adalah :

$$Y = b_0 + b_1 X_1 + b_2 x_2 + b_3 x_3 \varepsilon$$

$$Y = 323.980.494.550,513 + 0,113 X_1 + 5,784 X_2 + \varepsilon$$

Dari model regresi linear berganda yang dihasilkan tersebut dapat diketahui bahwa pengaruh dana perimbangan dan pendapatan asli daerah terhadap belanja daerah adalah positif dimana setiap kenaikan nilai dana perimbangan dan pendapatan asli daerah akan diikuti dengan kenaikan jumlah belanja daerah. Untuk melihat secara parsial (individu) bagaimana pengaruh masing-masing variabel yaitu dana perimbangan dan pendapatan asli daerah perlu dilakukan uji secara parsial.

Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel dana perimbangan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap belanja daerah. Hal ini ditunjukkan dengan nilai t-hitung untuk koefisien B1 yang nilainya lebih kecil dari t-tabel ($0,146 < 1,833$). Sebaliknya variabel pendapatan asli daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap belanja daerah, sebagaimana ditunjukkan oleh nilai t-hitung dari koefisien B2 yang nilainya lebih besar dari t-tabel ($2,196 > 1,833$).

Dari hasil analisis ini maka dapat dikatakan bahwa tidak terdapat flypaper effect dalam pengelolaan keuangan daerah di Pemerintah Kota Jayapura. Sebagaimana diketahui bahwa Syarat terjadinya flypaper effect adalah; a) apabila efek (nilai koefisien) DP terhadap Belanja Daerah lebih besar daripada efek PAD dan keduanya sama-sama signifikan, atau b) PAD tidak signifikan, maka dapat disimpulkan terjadi flypaper effect. Atau c) jika koefisien DP > Koefisien PAD maka terjadi flypaper Effect, atau dapat difungsikan jika $b_1 > b_2$ berarti $b_1/b_2 > 1$ maka terjadi flypaper Effect (Tresch, 2002:924). Hasil analisis menunjukkan tidak satupun indikasi terpenuhinya syarat terjadinya flypaper effect.

B. Efisiensi dalam pengelolaan Keuangan di Pemerintah Daerah Kota Jayapura

1. Efisiensi Belanja Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2015

Tabel 2. Kelompok Belanja Kegiatan Sosialisasi Menggunakan Fasilitas Di Luar Gedung Milik Pemerintah Daerah

No	Kegiatan	Total Angg. Berdasarkan DPA	Total Belanja Berdasarkan ASB	Efisiensi	Ket.
1	Sosialisasi Akreditasi 12 Puskesmas	229,674,500	125,605,745	0.546	Inefisien
2	Sosialisasi Peydot lumpur tinja	75,000,000	39,844,545	0.531	Inefisien
3	Sosialisasi Prog. Kes. Lingk.	200,000,000	77,689,345	0.388	Inefisien
Rata-rata				0,49	inefisien

Pada kelompok belanja kegiatan Sosialisasi menggunakan fasilitas diluar gedung milik pemerintah daerah berdasarkan DPA Dinas Kesehatan tahun anggaran 2015 terdapat tiga kegiatan sosialisasi yang merupakan kelompok belanja langsung. Adapun item belanja terdiri dari belanja tetap yang terdiri dari belanja sewa gedung, honor pns, honor non pns, dan honor narasumber. Sedangkan belanja variabel terdiri dari belanja bahan pakai habis, belanja cetak dan penggandaan, dan belanja makan minum.

Dan berdasarkan Analisis Standar Belanja di nyatakan inefisien (tidak efisien) karena Efisiensinya kurang dari satu. Adapun nilai rata-rata efisiensi dari ketiga kegiatan tersebut sebesar 0,49. Kondisi ini tentunya perlu menjadi perhatian agar dmasa depan perencanaan penganggaran kegiatan pada kelompok sosialisasi dapat dilakukan dengan lebih baik.

Pada kelompok kegiatan Rapat-rapat di dalam Kantor yang merupakan belanja langsung Dinas Kesehatan, dimana pada belanja tetap terdiri-dari honor non pns, dan belanja kantor, sedangkan yang tergolong belanja variabel terdiri dari belanja bahan pakai habis, belanja cetak dan penggandaan serta belanja makan minum. Adapapun *Outcome* yang diharapkan adalah tersedianya akumulasi data kesehatan.

Tabel 3. Kelompok Belanja Kegiatan Rapat-Rapat di Dalam Kantor

No	Kegiatan	Total Anggaran Berdasarkan DPA	Total Belanja Berdasarkan ASB	Efisiensi	Ket.
1	Rapat Pemuktahiran Data Standar Pelayanan Kesehatan.	100,000,000	12,957,090	0.129	Inefisien

Untuk kelompok kegiatan rapat-rapat didalam kantor, hanya terdapat satu kegiatan dengan besar dana dalam DPA adalah Rp.100 juta. Hasil analisis menunjukkan bahwa belanja pada kegiatan ini tidak efisien dimana nilai efisiensi sebesar 0,129. Kondisi ini disebabkan karena masih terdapat item belanja yang tidak seharusnya ada di dalam DPA, seperti belanja perjalanan dinas dan belanja modal.

Tabel 4. Kelompok Belanja Kegiatan Monitoring

No	Kegiatan	Total Angg. Berdasarkan DPA	Total Belanja Berdasarkan ASB	Efisiensi	Ket.
1	Monit. Rehab sarana prsarana	460,001,300	4,690,000	0.010	Inefisien

Sumber : Data diolah tahun 2017

Untuk Kelompok belanja kegiatan monitoring pada DPA tahun 2015 hanya terdapat satu kegiatan yaitu monitoring rehabilitas sarana prasarana memiliki *Outcome* adalah terpenuhinya tempat tinggal dan tempat pelayanan kesehatan yang baik. Adapun anggaran berdasarkan DPA sebesar Rp 460,001,300. Belanja kegiatan ini merupakan belanja langsung, dengan belanja tetap berupa belanja bahan pakai habis, dan belanja sewa sarana mobilitas, sedangkan belanja variabelnya terdiri dari belanja perjalanan dinas untuk lokal dan belanja makan minum.

Hasil analisis menunjukkan bahwa berdasarkan ASB maka nilai belanja monitoring sebesar Rp 4,690,000 sedangkan berdasarkan DPA sebesar Rp. 460,001,300,- sehingga dapat disimpulkan bahwa kegiatan tersebut tidak efisien dimana nilai efesiansinya hanya sebesar 0,01. Ketidak efisienan ini disebabkan masih terdapatnya beberapa item belanja yang tidak seharusnya ada dalam kegiatan monitoring seperti honor pns, honor non pns dan belanja modal.

Didalam kelompok belanja kegiatan bimbingan/pelatihan bagi pegawai dalam DPA dinas Kesehatan tahun 2017 terdapat 12 kegiatan. Adapun Dengan *outcome* tersedianya tenaga jabatan fungsional kesehatan 12 puskesmas dan klinik reproduksi. Belanja kegiatan ini merupakan belanja langsung dan item belanja yang termasuk belanja tetap adalah honor pns, honor non pns, belanja bahan pakai habis, belanja jasa kantor, belanja cetak dan penggandaan, belanja sewa gedung, belanja sewa sarana mobilitas. Sedangkan belanja variabelnya terdiri dari belanja makan minum, belanja perjalanan dinas, belanja modal penggandaan, dan belanja bahan material.

Tabel 5. Kelompok Belanja Kegiatan Bimbingan/Pelatihan Teknis Bagi Pegawai

No	Kegiatan	Total Angg. Berdasarkan DPA	Total Blnj Brdsarkn ASB	Efisiensi	Ket.
1	Pel. Pngktan Kapasitas Aparatur	240,000,000	136,286,665	0.567	Inefisien
2	Pel. Pengktan Kpsts Tng Prmosi	350,000,000	146,838,290	0.419	Inefisien
3	Pelatihan Akreditasi	131,000,000	140,507,315	1.072	Efisien
4	Pel. Pengktn Kpsts Tnga Kes.	300,000,000	168,001,835	0.560	Inefisien
5	Pel. Kslmtn Anak dan Remaja	840,000,000	266,403,275	0.317	Inefisien
6	Pel. TOT Jabatan	150,000,000	164,926,790	1.099	Efisien
7	Pel. Team Penilai Angka Kredit	150,000,000	147,742,715	0.984	Inefisien
8	Pel. Orientasi Kmpung Siaga	292,406,450	171,257,765	0.585	Inefisien
9	Pel. PTM Posbindu	300,000,000	148,225,075	0.494	Inefisien

10	Pel. Dokter Kecil	300,000,000	193,566,915	0.645	Inefisien
11	Pel.1000hari pratm	1,282,128,000	154,978,115	0.120	Inefisien
12	Pel. Pngktan Kes. Masy Port Numbay	710,700,000	168,001,835	0.236	Inefisien

Sumber : Data diolah tahun 2017

Hasil analisis menunjukka bahwa dari 12 kegiatan hanya terdapat 2 kegiatan yang dikategorikan efisien yaitu kegiatan pelatihan akreditasi dengan nilai efisiensi sebesar 1,072 dan kegiatan pelatihan TOT Jabatan dengan nilai efisiensi sebesar 1,099. Sedangkan 10 kegiatan lainnya tidak efisien karena nilai efisiensinya lebih kecil dari satu. Adapun sebab timbuuhnya ketidakefisienan ini karena nilai honor pns dan non pns yang melebihi standar yang ditetapkan.

Kegiatan Pelayanan Kesehatan masyarakat dalam DPA Dinas Kesehatan tahun 2017 hanya terdapat satu kegiatan yaitu Kegiatan Pengobatan langsung Cuma-Cuma dan *outcome* kegiatan ini adalah terlayannya penduduk miskin sebanyak 24.144 orang. Kegiatan ini merupakan belanja langsung dimana belanja tetap terdiri dari honor pns, honor non pns, belanja bahan pakais habis, belanja jasa kantor, belanja cetak dan penggandaan, belanja sewa gedung, belanja sewa sarana mobilitas, dan belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor. Sedangkkn belanja variabelnya terdiri dari belanja makan minum, belanja perjalanan dinas, belanja modal, belanja perawatan dan belanja bahan material.

Tabel 6. Kelompok Belanja Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat

No	Kegiatan	Total Angg. Brdsrkn DPA	Total Blnj Brdsrkn ASB	Efisiensi	Ket.
1	Pengobatan Langsung Cuma-Cuma	550,000,000	15,309,861,715	27.836	Efisien

Sumber : Data diolah tahun 2017

Kegiatan pelayanan pengobatan secara cuma-cuma dalam DPA 2017 memiliki belanja sebesar Rp 550,000,000, namun hasil analisis dan berdasarkan belanja Analisis Standar Belanja, nilai belanjanya hanya sebesar Rp 15,309,861,715. Dengan demikian belanja kegiatan ini merupakan kegiatan yang belanjanya efisien dengan nilai efisiensi sebesar 27,836. Gambaran efisiensi pada Dinas Kesehatan pada belanja kegiatan dalam DPA tahun 2017 berdasarkan kelompok kegiatan dengan berpedoman pada analisis standar belanja yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kota Jayapura menunjukkan bahwa dari 5 kelompok belanja kegiatan terdapat 1 (satu) kelompok belanja kegiatan yang efisien sedangkan 4 (empat) kelompok belanja kegiatan yang tidak efisien.

Tabel 7. Rekapitulasi Kelompok Belanja Kegiatan Dinas Kesehatan tahun 2015

No	Kelompok Analisis Standar Belanja	Tingkat Efisiensi	Keterangan
1	Kelompok Analisis Standar Belanja Sosialisasi/ Penyuluhan/ Seminar/ Talkshow/ Diskusi/ Kegiatan Sejenis-Menggunakan Fasilitas Di Luar Gedung Milik Pemerintah Daerah	0.488	Inefisien
2	Kelompok Analisis Standar Belanja Rapat-Rapat di Dalam Kantor	0.129	Inefisien
3	Kelompok Analisis Standar Belanja Monitoring	0.010	Inefisien
4	Kelompok Analisis Standar Belanja Bimbingan/Pelatihan Teknis Bagi Pegawai	0.591	Inefisien
5	Kelompok Analisis Standar Belanja Pelayanan Kesehatan Masyarakat	27.836	Efisien
Rata-rata Efisiensi Dinas Pendidikan tahun 2015		5.810	Efisien

Sumber : Data diolah tahun 2017

Adapun nilai efisiensi terendah dari 5 kelompok belanja kegiatan adalah 0,010 dan yang tertinggi adalah 27,836. Dengan demikian jika dilihat nilai rata-rata efisiensi untuk Dinas Kesehatan dinyatakan efisien dengan nilai rata-rata efisiensi sebesar 5,810. Namun kondisi ini perlu dilihat lebih jauh karena pada dasarnya jika dilihat dari sisi nilai efisiensi perkegiatan maka terlihat bahwa dari 18 kegiatan hanya ada 3 kegiatan yang efisien sedangkan 15 kegiatan lainnya tidak efisien.

2. Efisiensi Belanja Dinas Pendidikan Tahun Anggaran 2015

Belanja Dinas Pendidikan dalam DPA tahun 2015 yang akan dibahas dalam penelitian ini disesuaikan dengan pengelompokan kegiatan dalam ASB, dengan demikian pengelompokannya akan berjumlah 5 (lima) kelompok belanja yaitu; belanja Monitoring, Bimbingan/Pelatihan Teknis Bagi Pegawai, Bimbingan/Pelatihan Teknis Bagi Masyarakat, Belanja Pendampingan dan Belanja Pendataan.

Kelompok Belanja Kegiatan Monitoring Dinas Pendidikan dalam DPA tahun 2015 memiliki 25 kegiatan, dengan Dengan *outcome* tersedianya sarana dan prasarana pendidikan yang memadai. Dari 25 kegiatan tersebut hasil analisis menunjukkan bahwa tidak ada satupun belanja kegiatan yang efisien atau seluruh kegiatan inefisien. Adapun rentang nilai efisiensi antara 0,002 sampai dengan 0,039 dengan rata-rata tingkat efisiensi hanya sebesar 0,01028.

Tabel 8. Kelompok Belanja Kegiatan Monitoring

No	Kegiatan	Total Angg. Brdrsran DPA	Total Blnja Brdrsran ASB	Efisiensi	Ket.
1	Monit.Pemb.Gdung PAUD DOK	500,000,000	2,465,000	0.004	Inefisien
2	Monit.Pemb. Gdung PAUD Skyline	200,000,000	3,490,000	0.017	Inefisien
3	Monit. Pemb. Gdung PAUD Gilgal	336,000,000	8,180,000	0.024	Inefisien
4	Monit. Peng Olhrga SD	180,000,000	4,930,000	0.027	Inefisien
5	Monit. Rehab Ruangn Kls SMP	465,000,000	2,225,000	0.004	Inefisien
6	Monit. Pemb. RKB Guru SD	800,000,000	2,705,000	0.003	Inefisien
7	Monit.Pemb. Talut	650,000,000	2,705,000	0.004	Inefisien
8	Monit. Pemb. RKB SMP	669,000,000	2,705,000	0.004	Inefisien
9	Monit.Pemb. Gapura	150,000,000	5,955,000	0.039	Inefisien
10	Monit. Pemb. Pagar	500,000,000	6,675,000	0.013	Inefisien
11	Monit. Pemb. Jalan SMP	300,000,000	6,435,000	0.021	Inefisien
12	Monit. Pagar SD	250,000,000	2,465,000	0.009	Inefisien
13	Monit. Rehab SD Inpres	246,000,000	2,705,000	0.010	Inefisien
14	Monit. Pmsngn Paving SD	200,000,000	1,985,000	0.009	Inefisien
15	Monit.Pemb. Pgr Keliling SD Koya	474,000,000	2,705,000	0.005	Inefisien
16	Monit. Pemb. Pgr & Gpra SMP	500,000,000	1,985,000	0.003	Inefisien
17	Monit. Pemb. RKB SD Integral	400,000,000	8,965,000	0.022	Inefisien
18	Monit. Ruang Kls Bru SD Koya	669,000,000	2,705,000	0.004	Inefisien
19	Monit. Pemb. RKB SMK 3	669,000,000	2,705,000	0.004	Inefisien
20	Monit. Ruang Bljr SMA 1	550,000,000	2,225,000	0.004	Inefisien
21	Monit.Pemb. Aula SMA 1	900,000,000	2,225,000	0.002	Inefisien
22	Monit.Pemb. RKB SD YPK	960,000,000	3,730,000	0.003	Inefisien
23	Monit. Pemb. Talud SMKN 1	250,000,000	1,985,000	0.007	Inefisien
24	Monit. Pmsangn Paving SMKN 10	500,000,000	2,225,000	0.004	Inefisien
25	Monit. Rehab SDN	175,000,000	1,985,000	0.011	Inefisien
Rata-rata				0,01028	Inefisien

Sumber : Data diolah tahun 2017

Kondisi kelompok belanja kegiatan monitoring yang tidak efisien ini disebabkan karena dalam belanja masih terdapat item-item belanja yang tidak seharusnya ada dalam belanja ini, seperti honor pns, honor non pns dan belanja yang diserahkan oleh pihak ketiga, sehingga menyebabkan total blanja menjadi lebih besar dari hasil Analisis Standar Belanja.

Tabel 9. Kelompok Belanja Kegiatan Bimbingan/Pelatihan Teknis Bagi Pegawai

No	Kegiatan	Total Angg. Brdsrkn DPA	Total Belanja Brdsrkn ASB	Efisiensi	Ket.
1	Pel. Pnddkn TK	600,000,000	205,625,915	0.342	Inefisien
2	Pel. Penddkn Anak Usia Dini	850,000,000	259,891,415	0.305	Inefisien
3	Pel. DAK SD	1,957,361,165	139,301,415	0.071	Inefisien
4	Pel. Wajib Belajar 9 Tahun	3,457,120,000	145,330,915	0.042	Inefisien
5	Pel. Tata Kelola Wiyata	300,000,000	181,507,915	0.605	Inefisien
6	Pel. Pengktn Pnddkn Mnengah	2,908,712,800	135,683,715	0.046	Inefisien
7	Pel. Pningktn Mutu Sarana Dan Prasarana SMA	1,685,440,000	135,683,715	0.080	Inefisien
Rata-rata				0,213	Inefisien

Sumber : Data diolah tahun 2017

Kelompok Belanja kegiatan Bimbingan/Pelatihan Teknis Bagi Pegawai dalam DPA tahun 2017 memiliki 7 (tujuh) kegiatan, dimana *outcome* yang diharapkan adalah meningkatnya daya serap terhadap anak usia dini.

Hasil analisis menunjukkan bahwa nilai efisiensi terendah sebesar 0,046 dan nilai efisiensi tertinggi sebesar 0,605 dengan rata-rata nilai efisiensi sebesar 0.213. dengan demikian maka semua belanja kegiatan dapat dinyatakan tidak efisien. Kelompok Belanja Kegiatan Bimbingan/Pelatihan Teknis Bagi Masyarakat dalam DPA tahun 2017 dengan *outcome* yang diharapkan adalah meningkatnya angka melek aksara dan kesejahteraan warga belajar, hanya terdapat 1 (satu) kegiatan yaitu kegiatan Pelatihan Keaksaraan Fungsional bagi masyarakat dengan belanja dalam DPA sebesar Rp. 500.000.000,-.

Tabel 10. Kelompok Belanja Kegiatan Bimbingan/Pelatihan Teknis Bagi Masyarakat

No	Kegiatan	Total Angg. Brdsrkn DPA	Total Belanja Brdsrkn ASB	Efisiensi	Ket.
1	Pel. Keaksaraan Fungsional bagi masy	500,000,000	124,760,667	0.249	Inefisien

Sumber : Data diolah tahun 2017

Hasil analisis berdasarkan ASB diketahui bahwa belanja kegiatan ini sebesar Rp 124,760,667. Kondisi ini tentunya menunjukkan bahwa belanja kegiatan ini tidak efisien. Kondisi tidak efisien dalam belanja kegiatan ini karena adanya biaya pendataan buta aksara distrik Jayapura Utara dan Jayapura Selatan dan biaya pendataan keaksaraan fungsional yang anggarannya mencapai Rp 424,152,200.00. Kelompok Belanja Kegiatan Pendampingan dalam DPA tahun 2017 hanya memiliki 1 (satu) kegiatan yaitu Pendampingan PTK PAUDNI Berprestasi dengan nilai belanja sebesar Rp. 158.854.000,-.

Tabel 11. Kelompok Belanja Kegiatan Pendampingan

No	Kegiatan	Total Angg. Berdsrkn DPA	Total Belanja Brdsrkn ASB	Efisiensi	Ket.
1	Pndmpngn PTK PAUDNI Berprestasi	158,854,000	84,764,352	0.533	Inefisien

Sumber : Data diolah tahun 2017

Hasil analisis menunjukkan bahwa belanja pendampingan PTK PAUDNI Berprestasi nilainya sebesar Rp 84.764.352. hal ini tentunya menunjukkan bahwa belanja kegiatan ini tidak efisien, dimana nilai efisiensinya sebesar 0,533. Kondisi tidak efisien dari kegiatan ini disebabkan karena dalam item belanja terdapat belanja yang diberikan kepada pihak ketiga yang tidak terdapat pada item belanja sebagaimana ditentukan dalam ASB, yang berupa dana pembinaan para pemenang anggaran yang mencapai Rp 11,000,000.

Tabel 12. Kelompok Belanja Kegiatan Pendataan

No	Kegiatan	Total Angg. Brdsrkn DPA	Total Blnja Brdsrkn ASB	Efisiensi	Ket.
1	Pngktn Pndtaan Pnddkan	248,381,400	73,661,381	0.296	InEfisien

Pada kelompok belanja kegiatan pedataan pada DPA tahun 2017 dengan *outcome* yang diharapkan adalah terwujudnya pendataan pendidikan Kota Jayapura tahun 2015, hanya memiliki satu kegiatan pendataan yaitu pendataan pendidikan Kota Jayapura dengan nilai belanja kegiatan dalam DPA sebesar Rp.248.381.400,-. Hasil analisis berdasarkan ASB menunjukkan bahwa belanja kegiatan ini sebesar Rp.73.661.381,-dengan demikian maka belanja kegiatan ini tidak efisien.

Tabel 13. Efisiensi Kelompok Belanja Kegiatan Di Dinas Pendidikan tahun 2015

No	Kelompok Analisis Standar Belanja	Tingkat Efisiensi	Keterangan
1	Kelompok Analisis Standar Belanja Monitoring	0.010	Inefisien
2	Kelompok Analisis Standar Belanja Bimbingan/Pelatihan Teknis Bagi Pegawai	0.213	Inefisien
3	Kelompok Analisis Standar Belanja Bimbingan/Pelatihan Teknis Bagi Masyarakat	0.249	Inefisien
4	Kelompok Analisis Standar Belanja Pendampingan	0.533	Inefisien
5	Kelompok Analisis Standar Belanja Pendataan	0.296	Inefisien
Rata-rata Efisiensi Dinas Pendidikan tahun 2015		0.260	Inefisien

Sumber : Data diolah tahun 2017

Hasil Analisis Belanja kegiatanpada Dinas Pendidikan berdasarkan DPA tahun 2015 dimana terdapat lima kelompok belanja kegiatan menunjukkan bahwa setiap kelompok belanja kegiatannya tidak efisien. Adapun rentang nilai efisiensi antara 0,010 sampai 0,533 dan tingkat efisiensi rata-rata sebesar 0.260.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa, pada bab pembahasan didepan maka dapat dibuat beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Tidak terdapat fenomena Flypaper Effect dalam pengelolaan keuangan daerah pada pemerintah daerah Kota Jayapura.
2. Belanja Kegiatan Dinas Kesehatan berdasarkan 5 kelompok belanja kegiatan yang dianalisis menunjukan belanja kegiatan efisien. Walaupun demikian jika dibanding dari sisi jumlah kelompok kegiatan maka jumlah kelompok kegiatan yang tidak efisien lebih banyak yaitu 4 kelompok belanja kegiatan dan yang efisien hanya ada1 kelompok kegiatan.
3. Belanja kegiatan pada Dinas Pendidikan berdasarkan 5 kelompok belanja kegiatan yang dianalisis menunjukan belanja kegiatan tidak efisien. Selain itu tidak terdapat satu pun kelompok kegiatan maupun kegiatan yang efisien. .

B. Saran

1. Pemerintah Daerah Kota Jayapura diharapkan dapat mempertahankan peanggaran yang lebih bertumpu pada kemampuan daerah dalam hal ini PAD dibandingkan dengan menempatkan Dana Perimbangan sebagai penentu perubahan anggaran belanja.
2. Pemerintah Daerah Kota Jayapura terutama dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan diharapkan dalam menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) memperhatikan Analisis Standar Belanja agar RKA yang tersusun merupakan anggaran kegiatan yang Efisien.
3. Diharapkan penelitian selanjutnya dapat lebih memperdalam dan memperluas analisis pada disagregasi variabel dana perimbangan dan Organisasi perangkat daerah (OPD) yang lebih luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Anderson, E. and Srinivasan, S. S. (2003), "E-satisfaction and E-loyalty : A Contingency Framework," *Psychology and Marketing*, Vol. 20, No. 2, pp. 122-138.
- Abdullah, Sukriy dan Halim, Abdul. 2003. "Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Pemerintah Daerah Studi Kasus Kabupaten/Kota di Jawa dan Bali". Simposium Nasional Akuntansi VI, Yogyakarta, Hal 1140-1159.
- Afrizawati, 2012. "Analisis Flypaper Effect Pada Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan". *Jurnal Ekonomi dan Informasi Akuntansi (Jenius)*. Vol.2 No.1.
- Agus Widarjono, 2005. "The Impact of Intergovernmental Transfers on Local Spending: A Test of the Flypaper Effect", Simposium Riset Ekonomi II, Surabaya.
- Diah Ayu Kusumadewi dan Arif Rahman. 2007, "Flypaper Effect Pada Dana Alokasi Umu dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah Pada Kabupaten/Kota di Indonesia", *JAAI Volume 11 No. 1, Juni 2007* : 67-80.
- Gemmel Norman, Morrissey Oliver, and Pinar Abuzer. 1998; "Taxation, Fiscal Illusion and The Demand for Government Expenditures in The UK: a Time Series Analysis", *School of Economic Discussion Paper, NOW for Financial Support*, B46-363.
- Gorodnichenko, Yuriy. 2001, *Effects of Intergovernmental Aid on Fiscal Behavior of Local Governments: The Case of Ukraine*. Thesis. The National University of Kyiv-Mohyla Academy..
- Gujarati, Damodar. 2003. *Basic Econometric*. The McGraw Hill Companies Inc. New York.
- Guritno Mangkoesobroto,. 1994. *Ekonomi Publik*. Yogyakarta: BPFE.
- Halim, Abdul. 2002. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi Pertama. Bogor: Salemba Empat.
- Haryo Kuncoro, 2004. "Pengaruh Transfer Antar Pemerintah Pada Kinerja Fiskal Pemerintah Daerah Kota dan Kabupaten di Indonesia", *Jurnal Ekonomi Pembangunan* Vol. 9 No. 1, Juni 2004. Hal : 47-63.
- Hines R. James, & Thaler H. Richard. 1995, *Anomalies: The Flypaper Effect*. *The Journal of Economic Perspectives*, Vol. 9, No. 4. J Stor.

